

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi/ Deflasi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2022

No	Bulan (2022)	Inflasi/deflasi bulanan%	Inflasi/deflasi Kumulatif (ytd)%	Inflasi/Deflasi Tahunan (yoy)	Komoditi Penyumbang Inflasi/Deflasi	Penyebab
						Kenaikan inflasi pada komoditi, dikarenakan:
					Inflasi tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,41 persen, yaitu; Yoy: (okt 2021 s.d okt 2022) pada komoditi beras, cabe merah, telur ayam ras, bawang merah. Mtm (okt 2022)andil deflasi pada komoditi:cabe merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan cabe merah	Kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, beras belum masuk masa panen. Untuk bawang merah karena sumsel bukan daerah penghasil sentra bawang merah, dan upaya pembudidayaan telah dilakukan didaerah2 tertentu yang kondusif untuk tanaman bawang namun produksinya belum dapat memenuhi kbthan local dan masih tergtg daerah lain spt brebes dan lainnya.
10	Oktober	(-0,10)	5,5	6,51		

				Inflasi tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,89 persen, yaitu; Yoy: (Nov 2021 s.d Nov 2022) pada komoditi beras, cabe merah, telur ayam ras, bawang merah. Mtm (nov2022)andil deflasi pada komoditi:cabe merah, bawang putih, ikan mujair dan cabe rawit	Kenaikan inflasi pada komoditi dikarenakan: Kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, beras belum masuk masa panen. Untuk bawang merah karena sumsel bukan daerah penghasil sentra bawang merah, dan upaya pembudidayaan telah dilakukan didaerah2 tertentu yang kondusif untuk tanaman bawang namun produksinya belum dapat memenuhi kbthan local .
11	November (-0,06)	5,43	5,87		
				Inflasi tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,05 persen, yaitu; Yoy: (des 2021 s.d des 2022) pada komoditi beras, telur ayam ras, bawang merah. Mtm (des 2022)andil inflasi pada komoditi:daging ayam, telur ayam rasa, dan cabe merah.	Kenaikan inflasi pada komoditi dikarenakan: Kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, beras belum masuk masa panen. Untuk bawang merah karena sumsel bukan daerah penghasil sentra bawang merah, dan upaya pembudidayaan telah dilakukan didaerah2 tertentu yang kondusif untuk tanaman bawang namun produksinya belum dapat memenuhi kbthan lokal .
12	Desember 0,48	5,94	5,94		

Beberapa komoditi pangan (volatile food) pada triwulan IV cenderung mengalami kenaikan pada tingkat inflasi tahunan pada beberapa komoditi pangan yaitu beras dan daging ayam ras,

telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah. Namun perlu diperhatikan pada kondisi tingkat inflasi bulan, yaitu terjadi deflasi pada bulan oktober dan November. Pada bulan Oktober dan November mengalami kenaikan terus menerus pada beberapa komoditi penting namun secara bulanan mengalami deflasi hal ini perlu diwaspadai kondisi dimana daya beli masyarakat yang rendah mengalami penurunan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan tersebut

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan ke IV, pengaruh dari ketidakpastian global masih membayangi, perang di beberapa Negara penyumbang energy dunia yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar berdampak pula pada naiknya harga minyak goreng yang bahan bakunya merupakan salah satu bahan baku bahan bakar dan sampai saat ini pergerakan harganya belum stabil, dan secara tidak langsung mengakibatkan/berpengaruh pada kenaikan beberapa bahan pangan lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota giat melakukan koordinasi dalam rangka untuk menjaga harga komoditi bahan pangan pokok khususnya beras, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras dan cabe sedangkan gula pasir dalam kondisi harga stabil.

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota Sumatera Selatan, turut aktif ikut dalam Rakor mingguan yang telah diadakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat mulai tanggal 24 Oktober s.d. 26 Desember 2022.

Untuk mengantisipasi keresahan dan berkurangnya kemampuan daya beli di masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pemerintah Pusat berupaya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat segera ditidakanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan inflasi daerah agar kondisi di masyarakat tetap aman terhindar dari gejolak kenaikan harga dari beberapa bahan pangan pokok dan barang penting lainnya melalui pemanfaatan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) PMK RI No:134/PMK.07/2022 dan Dana insentif Daerah (DID) PMK RI No.140/PMK.07/2022 tentang DID Untuk Penghargaan Kinerja tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insetif Daerah tambahan Tahun anggaran 2020, Dan Sisa DID Tahun Anggaran 2021.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Setelah Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM, dampak yang akan terjadi akan menimbulkan gejolak dimasyarakat, Pemerintah Pusat sigap dengan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyikapi kondisi yang akan terjadi menghindari ketidak amanan di masyarakat.

Pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan menganggarkan 2% dari Dana Tranfer Umum (DTU).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah Menindaklanjuti PMK RI No.1 134/PMK.07/2022 melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Menteri

Keuangan RI (Dirjen perimbangan Keuangan) dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 900/3173/BPKAD-II/2022 Tanggal 15 September 2023 tentang Laporan Penganggaran Belanja wajib Perlindungan Sosial Dalam rangka Penanganan Dampak inflasi Tahun Anggaran 2022.

Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV telah melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi dengan opd terkait. Beberapa program yang telah dilakukan dalam upaya melalui strategi 4K:

1. Upaya pemenuhan **Ketersediaan pasokan** melalui;
 - Memperkuat program “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan” melalui pemberian bibit cabai merah di 17 Kab/Kota dan program budidaya ayam kampung unggul dengan pemberian bantuan DOC, pakan dan kandang;
 - Pelaksanaan monitoring harga dan sidak pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah antara lain oleh TPID Kab. OKU, Kota Palembang, Kab. Musi Rawas, dan berbagai TPID lainnya di wilayah Sumsel;
 - Pelaksanaan program Pekarangan Pangan lestari di wilayah Sumatera Selatan antara lain Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau;
 - Implementasi *Digital Farming* pada klaster cabai dan bawang merah binaan BI Sumsel bekerja sama dengan Balitbangda Provinsi Sumsel;
 - Kegiatan Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi (KPSH) Komoditi pangan, khususnya beras oleh Perum Bulog.
2. Upaya **Keterjangkauan harga** melalui;
 - Monitoring harga komoditas bahan pokok secara harian oleh dinas terkait, seperti dinas perdagangan, dinas ketahanan Pangan dan peternakan;
 - Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perum Bulog telah melakukan kegiatan operasi pasar & pasar murah, misalnya operasi pasar beras oleh TPID Provinsi Sumsel di 29 titik pasar di Kota Palembang, operasi pasar bahan pokok oleh TPID Kota Palembang di 18 kecamatan Kota Palembang, operasi pasar murah di 8 Kecamatan Kota Lubuklinggau, operasi pasar sembako di 4 kecamatan Kab. Musi Rawas Pelaksanaan menggunakan berbagai sumber anggaran termasuk optimalisasi dana BTT, DTU dan kerjasama dengan distributor bahan pokok;
 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan bersama Bulog dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumsel menyelenggarakan Gelar Pangan Murah pada 30 Nov-1 Des’22, 5-6 Des’22, dan 8-9 Des’22 dengan komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging sapi, daging ayam, cabe, bawang merah, dan bawang putih;
 - Pembelian Beras setiap bulannya oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikoordinir oleh OPD masing-masing bekerja sama dengan perum Bulog, sebagai himbauan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk menggunakan beras petani lokal dalam rangka menekan harga dan menjaga tingkat inflasi pada komoditi;
 - Dinas Pertanian Prov. Sumsel menggelar Pasar Tani secara rutin setiap rabu dan jumat untuk komoditas pangan seperti daging ayam ras, beras dan telur bekerja sama dengan distributor dan Gapoktan binaan; serta
 - kegiatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) komoditas pangan, khususnya oleh Perum Bulog;
3. Memastikan **Kelancaran distribusi** dengan;
 - TPID Provinsi Sumsel telah mengkoordinasikan jalur distribusi dan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan dan bahan pokok penting, BBM, dan komoditas strategis lainnya.

Pemberian subsidi sektor transportasi misalnya untuk tukang ojek, angkot dan perahu mesin dengan optimalisasi anggaran DTU total sekitar 1,05 miliar antara lain oleh TPID Kab. Musi Banyuasin, Empat Lawang, dan Ogan Ilir.

- Pelaksanaan kesepakatan bersama mengenai pengembangan pembangunan potensi daerah antara Kota Palembang dengan kabupaten Bangli, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah dengan pelaksanaan KAD untuk komoditas bawang merah.
- Kerja sama pendistribusian pangan Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin untuk komoditas telur ayam ras .
- Optimalisasi pemanfaatan aplikasi “Market Place Sibejajo”.
- Melakukan sidak pasar komoditas dan khususnya ketika terjadi kenaikan harga;

4. Komunikasi yang efektif melalui;

- HLM TPID se Provinsi Sumsel pada Senin, 12 Desember 2022 sebagai wadah koordinasi pengendalian inflasi jelang HBKN Nataru 2022.
- Rapat Koordinasi jelang HBKN Nataru oleh masing-masing TPID Provinsi Sumsel dan Kab/Kota lainnya, a.l Kab Ogan Ilir, Musi Rawas, Kota Palembang dsb.
- Pelaksanaan Konferensi Pers bersama TPID se Sumsel pada 12 Desember 2022 untuk menyampaikan perkembangan inflasi, ketersediaan stok dan pasokan & himbauan belanja bijak.
- Pelaksanaan talkshow mengenai pengendalian inflasi dan ketersediaan pasokan jelang Nataru oleh TPID Kab. Ogan Ilir.
- Publikasi mengenai berbagai kegiatan pengendalian inflasi misalnya operasi pasar beras murah, sidak pasar, dan Gertam cabai oleh berbagai TPID di wilayah Sumsel untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan ke IV, tingkat inflasi tahunan Provinsi Sumatera Selatan masih berada di atas target capaian Nasional ($3\pm 1\%$) yaitu 5,94% (yoy), sedangkan saat ini tingkat inflasi Nasional sebesar 5,51%.

Pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan Pelaksanaan Operasi Pasar/pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan tetap dilaksanakan sebagai bantalan pertahanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini khususnya untuk menjaga stabilitas harga komoditi bahan pangan pokok dan BBM maupun BBM Subsidi, sejak adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan kenaikan beberapa komoditi pangan lainnya hal ini cukup memberatkan masyarakat yang sebelumnya kena imbas dari pandemic corona, kenaikan harga minyak goreng dan harga BBM akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan Belanja Tak Terduga dengan mengeluarkan keputusan Gubernur dan Pengalokasian Belanja Trasfer Umum APBD sebesar 2%. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu yang kemungkinan akan kena dampak inflasi akibat dari kenaikan BBM dan komoditi bahan baku penting lainnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Diharapkan agar tetap melakukan koordinasi yang berkelanjutan dari anggota TPID

dalam rangka pelaksanaan program GSMP dan Operasi Pasar/Pasar Murah dan Upaya lainnya oleh opd dan instansi terkait dalam rangka antisipasi terhadap kenaikan harga barang pokok;

2. Mendorong percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi bahan;
3. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui proses komunikasi dan publikasi mengenai informasi mengenai ketersediaan Komoditas Pangan dan komoditi penting;
4. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota, distributor/produsen Minyak Goreng dan Beras, BUMN, BUMS dan pihak lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan koordinasi maupun untuk mengadakan operasi pasar dan pasar murah, dalam rangka keterjangkauan harga komoditi dikarenakan kenaikan harga Dengan Demikian diharapkan tidak terdapat gejolak di masyarakat yang akan menimbulkan hal yang anarki yang tidak diinginkan;
5. OPD terkait dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer Umum, serta DID dan segera mengaplikasikannya dengan program yang tepat dalam penanganan pengendalian inflasi saat.